

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI  
HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

**OLEH:**

**DEDEK RODHATUL JANNAH  
NPM. 18100023  
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)  
BANDA ACEH  
2022**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang mana satu-satunya zat yang menjadi tempat luapan ungkapan syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Karena Allah lah yang menjaga kesehatan, mencerdaskan ide, sekaligus senantiasa menjadi motivasi terbesar. Tak lupa shalawat beriring salam kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya menuntut ilmu. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020.”**

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Banta Karollah, SE., M.S.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.
2. Ibu Eliana, SE., M.Si. selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh dan selaku dosen pembimbing pertama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Intan Novia Astuti, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh dan selaku dosen pembimbing kedua bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.
5. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi karena berkat doa merekalah Alhamdulillah saya mampu menjalani hari-hari dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh staf pengajar program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung saya sebagai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT. selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua dan terkhusus bagi yang penulis ucapkan terima kasih di atas.

Banda Aceh, 01 April 2022

Penulis,

Dedek Rodhatul Jannah

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2. Masalah Penelitian.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Skop Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1. Belanja Modal .....	13
2.1.1. Pengertian Belanja Modal .....	13
2.1.2. Jenis-Jenis Belanja Modal .....	14
2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal .....	20
2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	23
2.2.1. Pengertian Asli Daerah (PAD) .....	23
2.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	23
2.3. Dana Alokasi Umum (DAU) .....	28
2.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) .....	28
2.3.2. Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).....	29
2.3.3. Cara Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).....	30
2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	32
2.4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK).....	32
2.4.2. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	33
2.5. Dana Bagi Hasil (DBH).....	37
2.5.1. Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH) .....	37
2.5.2. Sumber-sumber Dana Bagi Hasil (DBH).....	38
2.5.3. Tahapan Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) .....	39
2.6. Penelitian Terdahulu .....	44
2.7. Kerangka Konseptual.....	49
2.8. Hipotesis Penelitian .....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
3.1. Populasi dan Sampel .....	58
3.2. Metode Penarikan Sampel .....	60

3.3. Metode Pengumpulan Data .....	61
3.4. Operasional Variabel.....	62
3.5. Metode Analisis Data.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	73
4.2. Hasil Penelitian Uji Asumsi Klasik .....	75
4.2.1. Hasil Uji Normalitas.....	75
4.2.2. Hasil Uji Multikolinieritas .....	78
4.2.3. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	79
4.2.4. Hasil Uji Autokorelasi.....	81
4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	82
4.4. Hasil Uji Hipotesis.....	84
4.4.1. Hasil Uji Koefisien Determinansi ( $R^2$ ).....	84
4.4.2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	86
4.4.3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	86
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian .....	88
4.5.1. Pengaruh PAD ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal (Y) .....	88
4.5.2. Pengaruh DAU ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal (Y) .....	89
4.5.3. Pengaruh DAK ( $X_3$ ) terhadap Belanja Modal (Y) .....	90
4.5.4. Pengaruh DBH ( $X_4$ ) terhadap Belanja Modal (Y).....	91
4.5.5. Pengaruh PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ), dan DBH ( $X_4$ ) terhadap Belanja Modal (Y) .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
5.1. Kesimpulan .....	93
5.2. Saran .....	93
<b>DAFTAR PERPUSTAKAAN .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tebel I.1. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020 .....	4
Tabel II.1. Komponen Biaya yang digunakan di dalam Belanja Modal .....	16
Tabel II.2. Klasifikasi Belanja Modal .....	17
Tabel II.3. Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel III.1. Populasi Penelitian .....	58
Tabel III.2. Sampel Penelitian.....	59
Tabel III.3. Operasional Variabel.....	65
Tabel III.4. Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi .....	69
Tabel IV.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	73
Tabel IV.2. Hasil Uji <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i> .....	78
Tabel IV.3. Hasil Uji Multikolinieritas .....	79
Tabel IV.4. Hasil Uji Autokorelasi .....	81
Tabel IV.5. Hasil Uji Autokorelasi ( <i>The Cochrane-Orcutt two-step Procedure</i> ).....	82
Tabel IV.6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
Tabel IV.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	85
Tabel IV.8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	86
Tabel IV.9. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	87

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar II.1. Kerangka Konseptual .....	55
Gambar IV.1. Grafik Histogram .....	75
Gambar IV.2. Grafik Normal <i>P-Plot</i> .....	77
Gambar IV.3. Grafik <i>Scatterplot</i> .....	80

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Dedek Rodhatul Jannah  
NPM : 18100023  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau jiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar rujukan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di STIES Banda Aceh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,

Dedek Rodhatul Jannah



## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2020**

Nama : Dedek Rodhatul Jannah  
NPM : 18100023  
Pembimbing I : Eliana, SE., M.Si  
Pembimbing II: Intan Novia Astuti, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 data pengamatan yang diperoleh dari total populasi yaitu berjumlah 23 Kabupaten/Kota dikalikan dengan jumlah tahun pengamatan yaitu sebanyak 4 tahun dengan teknik sampling total atau sensus. Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Uji parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2020.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang dan Permasalahan**

Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat negara-nya tanpa meninggalkan sebuah prinsip yang menjadi landasan penting yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maksudnya, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Dalam Irfansyah (2016) dijelaskan bahwa semenjak pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sampai saat ini, daerah otonom baru di Indonesia berjumlah 539, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) provinsi, 412 (empat ratus dua belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota, tidak termasuk 5 (lima) kota administratif dan 1 (satu) kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta. Konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah bahwa alokasi anggaran yang sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,

banyak yang harus dialihkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta keperluan lain bagi pemekaran daerah otonom baru. Semakin banyak daerah pemekaran, tentu akan berdampak pada penyebaran dana alokasi umum secara proporsional kepada seluruh daerah. Implikasi yang dirasakan oleh pemerintah pusat saat ini adalah meningkatnya kebutuhan penyediaan dana alokasi khusus, dan meningkatnya alokasi belanja pemerintah untuk mendanai instansi vertikal yang ada di daerah.

Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor agar menanam modal atau berinvestasi di daerah-daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya tergantung pada keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Oleh karena itu, agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah-nya, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Upaya mobilisasi peningkatan PAD, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah memberlakukan beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi diberikan akses terhadap 5 (lima) jenis pajak, sementara pemerintah kabupaten/kota

diberikan akses terhadap 11 (sebelas) jenis pajak. sedangkan di sektor retribusi, pemerintah daerah diberikan akses terhadap 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu (Irfansyah, 2016).

Prinsip otonomi seluas-luasnya membuat manajemen kepegawaian dan keuangan yang dahulu diatur dengan ketat oleh pusat didelegasikan secara penuh kepada daerah. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan terus ditingkatkan. Salah satu upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan adalah dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desentralisasi pemerintahan akhirnya banyak melahirkan daerah baru (Badan Pusat Statistik, 2020).

Badan Pusat Statistik Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa berkembangnya jumlah pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Salah satunya, ingin diketahui aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Anggaran pemerintah difungsikan sebagai modal pembiayaan kepada pembentukan modal daerah dengan semakin bertambahnya kualitas daerah, baik

yang bersifat fisik dan non fisik. Dalam hal pembiayaan belanja modal, pemerintah daerah dituntut agar menggunakan anggaran pengeluaran yang mampu membangun kemandirian atas daerah berlandaskan perkembangan daerah yang diwujudkan bersamaan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (Fadillah, 2021).

Andaiyani (2013) menjelaskan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik itu untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal, sehingga proses penyusunan daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Menurut Widiasmara (2019) belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, permasalahan yang terjadi dalam belanja modal Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Aceh selama periode 2017-2020 tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel I.1.**  
**REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2020 (MILIAR RUPIAH)**

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Modal			
		2017	2018	2019	2020
1.	Simeulue	432,81	134,08	202,99	180,12
2.	Aceh Singkil	279,30	118,18	181,74	198,85
3.	Aceh Selatan	389,95	233,60	265,84	223,28
4.	Aceh Tenggara	364,23	221,50	229,64	137,60
5.	Aceh Timur	412,60	140,37	390,86	272,05
6.	Aceh Tengah	411,26	188,30	278,73	239,03
7.	Aceh Barat	313,21	190,24	263,51	359,23
8.	Aceh Besar	284,53	237,28	285,17	299,99
9.	Pidie	307,26	289,46	304,25	262,39

10.	Bireuen	410,28	193,56	295,40	296,00
11.	Aceh Utara	374,75	247,24	420,69	424,17
12.	Aceh Barat Daya	235,33	390,72	270,58	248,18
13.	Gayo Lues	241,99	189,18	189,67	238,30
14.	Aceh Tamiang	292,20	196,20	242,63	276,94
15.	Nagan Raya	336,68	238,02	293,44	347,59
16.	Aceh Jaya	278,77	133,36	159,31	153,04
17.	Bener Meriah	245,58	166,29	189,88	183,21
18.	Pidie Jaya	234,17	173,33	205,02	208,97
19.	Banda Aceh	227,59	83,31	148,96	224,26
20.	Sabang	129,33	125,32	178,52	182,74
21.	Langsa	333,30	45,41	198,59	179,56
22.	Lhokseumawe	223,59	122,01	203,88	208,67
23.	Subulussalam	267,09	98,88	182,34	217,14
<b>Jumlah</b>		<b>6,836,80</b>	<b>4,155,84</b>	<b>5,581,62</b>	<b>5,561,35</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Berdasarkan tabel I.1 di atas, realisasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Untuk daerah kota, belanja modal Pemerintah Kota Langsa merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 333,30 miliar rupiah pada tahun 2017. Akan tetapi belanja modal yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Langsa semakin menurun drastis menjadi hanya 45,41 miliar rupiah pada tahun 2018. Sedangkan belanja modal Pemerintah Kota Sabang merupakan yang terendah, yaitu 129,33 miliar rupiah pada tahun 2017 dan diperkirakan menjadi 125,32 miliar rupiah pada tahun 2018. Rata-rata realisasi keseluruhan belanja modal kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017.

Maka, berdasarkan badan pusat statistik secara umum realisasi belanja modal Provinsi Aceh pada kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya, yaitu dari 6,836,80 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 4,155,84

miliar rupiah tahun 2018, dan 5,581,62 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 5,561,35 miliar rupiah pada tahun 2020.

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum konsisten dalam melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat melalui realisasi belanja modal sesuai dengan esensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Damanik (2021), naik turunnya angka belanja modal dapat disebabkan karena kurangnya atau lambatnya pemerintah daerah dalam melakukan persiapan atau dalam proses pelelangan pekerjaan.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah juga penting untuk diperhatikan. Jika terjadi hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran maka ini akan mengakibatkan rendahnya realisasi dalam belanja modal. Menurut Sinaga (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran yaitu: (1) Adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparatur di berbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran; (2) Lemahnya perencanaan; (3) Kurangnya pemahaman sejumlah aparatur di berbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawaban; (4) Proses panjang birokrasi; (5) Prosedur kementerian keuangan; (6) Keterlambatan penetapan APBN/APBD; (7) Keterlambatan petunjuk teknis (Juknis); dan (8) Perubahan sistem aplikasi dan pergantian sumber daya.

Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, sehingga perlunya penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baik oleh pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga peningkatan akan pelayanan masyarakat diharapkan dapat terwujud (Damanik, 2021).

Sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam upaya meningkatkan belanja modal yakni salah satunya adalah PAD. Adanya otonomi daerah, akibatnya pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya PAD, maka ini dapat dijadikan sebagai modal yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Endang & Riana (2020) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk memenuhi belanjanya yang salah satunya adalah belanja modal.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Akibat diberlakukannya otonomi daerah, maka timbul perbedaan potensi keuangan daerah sehingga terciptanya kesenjangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, dalam pembuatan kebijakan tentu diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi provinsi/kabupaten/kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi



kebutuhan tersebut maka disusunlah Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Dalam mengatasi hal ini serta mendukung otonomi daerah, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk kegiatan pemerintah daerah sebagai wujud dari implementasi desentralisasi. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiani, Ermawati & Shinta (2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena nilai koefisien DAU memiliki arah positif yang artinya bahwa semakin tinggi DAU maka belanja modal akan semakin meningkat.

Selain DAU terdapat juga jenis dana perimbangan lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengertian DAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 angka 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyebutkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustawa (2017), menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, kondisi yang menjelaskan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena dana ini hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang keperluan khusus tertentu saja, terutama untuk pembiayaan belanja modal DAK.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) juga termasuk ke dalam dana perimbangan yang merupakan sumber pendanaan yang dapat dikelola dalam meningkatkan pengalokasian belanja modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfansyah (2016) menunjukkan bahwa secara parsial DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020.”**

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?
5. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Bagi Praktisi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau bahan pertimbangan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

##### **1.4.2. Bagi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

#### **1.5. Skop Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil skop pada bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik sesuai dengan judul penelitian ini yaitu

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020.

## DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Aditiya, Nanda Yoga dan Novi Dirgantari. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015. Kompartemen: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. XV, No.1, Hal. 42-56.
- Adyatma, Erdi & Rachmawati Meita Oktaviani. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Andaiyani. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah* 1(1).
- Aqnisa, Reuty Fajar. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*. ISBN: 979-26-0266-6. Universitas Widyatama Bandung.
- Damanik, Cindy Tania. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Program Studi Strata 1. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Fadillah, Fuad. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Investasi Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Dengan Belanja Modal Sebagai Mediasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota*

- Di Pulau Sumatera*. Tesis. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan, Cetakan IX. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartono, Jogiyanto. (2016). *Metodelogi Penelitian Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi keenam (Cetakan Keempat), BPFE, Yogyakarta.
- Irfansyah, Muhammad. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92. ISSN: 2302-8556*. Universitas Udayana. Bali.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4. Penerbit: Erlangga.
- Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Jurnal SNA XV Banjarmasin 20-23 September 2012*.
- Maryadi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang*
- Mawarni, Darwanis, dan Syukriy, Abdullah. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164*. Volume 2, No.2, Mei 2013 - 80. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Aceh.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja

- Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi)*. Vol.9, No.2, Hal. 91-102.
- Mustawa, Gogor Zais. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Dosen Tetap Fakultas Ekonomi*. Universitas Tridinanti. Palembang.
- Prastiwi, Ayu, Siti Nurlaela & dan Yuli Chomsatu. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Seminar Nasional IENACO-2016*, 872–879.
- Priyatno, Duwi. (2014). *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Andi. Yogyakarta.
- Provinsi Aceh. (2017-2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh*. Badan Pusat Statistik.
- Provinsi Aceh. (2019-2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh*. Badan Pusat Statistik.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Sektor Publik*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.



- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar*.
- Sinaga, Edward James. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Vol. 5 No. 2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI*. Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5. Kuningan. Jakarta Selatan.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Lufti, Muslich. (2014). *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. USU Press. Medan.
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) (2an ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudarwadi, Hustianto. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014). *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. ISBN: 978-602-17129-5-5. SNEMA-2015. Padang.
- Sudrajat, M. Agus dan Irma Diastuti Purniawati. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*. Prodi. Akuntansi-FEB, UNIPMA, Vol.1, No.1, Hal. 56-66.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT. Alfabeta.
- Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol.1, No.1, Hal.183-191.
- Syukri, Muhammad & Hinaya Hiyana. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA/ Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30.
- Wadiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja

Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Vol. 2 No. 1. Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis. IAIN Surakarta.*

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).